

Peranan Pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pasar Di Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu Tahun 2021-2022

Risky Perdana Mokoagow¹

Ismail Rachman²

Fanley Pangemanan³

Email Korespondensi: mokoagowrisky1@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu. Kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dari berbagai berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah Desa dan Kelurahan, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten/pemerintah Kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. fokus penelitian peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pasar Di Kelurahan Genggulang di gunakan teori menurut *Henry Mintzberg* dalam ulber silalahi (2017:50) yang mengemukakan dalam menjalankan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam suatu organisasi. Adapun hasil penelitian disimpulkan Dimana pemimpin secara konsisten menghadiri setiap acara-acara serimonial dilingkungan masyarakat kelurahan genggulang seperti acara adat pesta perkawinan adat upacara pemakaman orang meninggal dunia, upacara perayaan keagamaan, upacara perayaan nasional dan upacara kegiatan olahraga dan sosial. dan pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sering mewakili pemerintah kelurahan untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan atas nama pemerintah kelurahan. Sehingga anjuran pemimpin sebagai tokoh ditengah-tengah kehidupan masyarakat dapat mendorong untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar di Kelurahan Genggulang.

Kata Kunci : Peranan, Pemimpin, LPM, Partisipasi Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dari berbagai berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah Desa dan Kelurahan, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten/pemerintah Kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat melibatkan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung mulai dari proses musyawarah perencanaan pembangunan; sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 1, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Point 2, Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Point 3, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dipertegas pada bab V, tentang penyusunan dan penetapan rencana, bagian pertama, rencana

pembangunan jangka Panjang pada pasal 11 point 1, menyatakan bahwa Musrebang diselenggarakan dalam Menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa keterlibatan anggota masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan menjadi hal yang sangat penting keikutsertaannya sehingga perlu didorong agar masyarakat terlibat secara aktif dalam proses kegiatan pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan proses pembangunan sangat diperlukan adanya Kerjasama berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Pembangunan adalah sesuatu kegiatan yang terjadi prosesnya dari masyarakat dan oleh masyarakat, dan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan mensyaratkan pelibatan atau partisipasi seluruh warga masyarakat, dimana anggota masyarakat terlibat sejak pengambilan keputusan tentang hasil rumusan perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan, serta pemanfaatan hasil hasilnya oleh masyarakat. Dimana pihak pemerintah

dan masyarakat termasuk aparat pemerintah, aktivis Lembaga pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial atau para inovator dan tokoh-tokoh formal dan informal masyarakat dapat terlibat secara keseluruhan untuk ikut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Upaya-upaya untuk tercapainya perbaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun anggota masyarakat. Sehubungan dengan optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini menuntut perhatian dan keberpihakan dari lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menunjukkan peranannya dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di lingkungan wilayah kerja daerah masing-masing. Sehubungan dengan adanya pembangunan di wilayah Kelurahan Genggulang Kecamatan Kotamobagu Utara dengan memusatkan perhatian pada satu objek pembangunan pasar rakyat Genggulang menjadi hal yang menarik perhatian penulis untuk diteliti dan dipelajari peranan pemimpin Lembaga pemerintah dan pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pembangunan tersebut, sehingga tertarik melakukan penelitian dan penulisan salah satu peranan Lembaga yang ada di kelurahan Genggulang dijadikan objek penelitian, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimana Lembaga ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana pada BAB VII Bagian kesatu, pembentukan pasal 10, point (1) di kelurahan dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan. Point (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas

Prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Bagian kedua, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban, pasal 11 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan pembangunan pasar rakyat Genggulang yang dibangun atas kerja sama Kementrian Perdagangan Republik Indonesia dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kotamobagu melalui dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2021, dimana pembebasan lahan hanya untuk pembangunan sarana pasar dan jalan masuk, sehingga untuk mengoptimalkan operasional kegiatan pasar memerlukan partisipasi masyarakat pemilik lahan di wilayah pasar untuk dapat digunakan sebagai lahan aktivitas jual beli pada saat membludaknya penjual dan pembeli, dan masyarakat Kelurahan Genggulang dapat berpartisipasi dalam penataan tata ruang pasar yang masih semeraut, serta keikutsertaan masyarakat berpartisipasi menjaga ketertiban dan keamanan serta mewujudkan lingkungan pasar yang bersih aman dan nyaman

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. fokus penelitian peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pasar Di Kelurahan Genggulang di gunakan teori menurut *Henry Mintzberg* dalam *Ulber Silalahi* (2017:50) yang mengemukakan dalam menjalankan peranan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat dalam suatu organisasi dapat diukur melalui kegiatan sebagai:

- “Tokoh” (*Figurehead*): melaksanakan kewajiban dalam upacara-upacara seremonial, seperti penyambutan tamu;
- “Pemimpin” (*leader*): menggerakkan, membimbing dan memotivasi bawahan dengan menggunakan kekuasaan;
- “Penghubung” (*Liaison*): membuat kontak atau jaringan dengan luar atau menghubungkan organisasi dengan lingkungan luarnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: Teknik Pengumpulan Data Primer. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang digunakan dengan jalan bekerja dengan data. Mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pembahasan

1. Peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai Tokoh.

Peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai tokoh untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar di Kelurahan Genggulang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan genggulang telah melaksanakan tugas dan fungsinya,

sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Serta pelayanan yang maksimal mengingat kegiatan masyarakat dikelurahan genggulang penuh dengan dinamika dimana pelaksanaan adat istiadat yang turun temurun terpelihara sampai sekarang. Sehingga sebagai pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat yang dipilih oleh anggota masyarakat memiliki beban dan kewajiban untuk menghadiri setiap acara yang dilaksanakan anggota masyarakat di wilayah kelurahan genggulang. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat bapak Riswanto Dali, sebagai berikut : sebagai pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat periode 2021 sampai 2022 selalu menghadiri setiap kegiatan acara adat pesta perkawinan, acara adat upacara pelepasan dan pemakaman orang yang meninggal dunia, acara perayaan peringatan hari hari besar Islam dan acara perayaan peringatan hari hari besar Nasional. Bahkan sebagai pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat juga menghadiri acara kegiatan pembukana perlombaan olah raga dan kegiatan sosial lainnya, yang dilaksanakan oleh pemuda maupun remaja kelurahan genggulang. Dari uraian yang dijelaskan pemimpin pemberdayaan masyarakat ternyata bahwa kegiatan-kegiatan acara upacara adat dimasyarakat kelurahan genggulang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat, kendati pun setiap pelaksanaan upacara adat memiliki konsekuensi biaya yang relative besar sebagai mana yang telah ditetapkan oleh majelis hukum adat. Adapun upacara adat yang selalu dihadiri oleh pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai tokoh meliputi

antara lain : upacara adat pesta perkawinan, upacara pemakaman orang meninggal dunia, upacara adat keagamaan dan upacara kegiatan olahraga serta upacara kegiatan sosial yang dilakukan oleh generasi muda.

2. Peranan Kepemimpinan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Pemimpin

Peranan Kepemimpinan Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai pemimpin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar dikelurahan gunggung berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai pemimpin telah menjalankan tugas dan fungsi untuk memimpin kegiatan organisasi Lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat, sebagai pemimpin ketua dalam menjalankan organisasi melakukan kepemimpinan secara terbuka atau transparan dan membagi semua tugas kepada semua pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat agar berfungsi sesuai bidang tugas masing-masing yang telah ditetapkan dan disetujui bersama dan tergambar dalam bagan struktur organisasi. Hal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh informan R.D. yang menyatakan bahwa Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah organisasi mitra pemerintah kelurahan yang memiliki ruang lingkup, fungsi dan tanggung jawab mendampingi pemerintahan kelurahan gunggung dalam menjalankan tugas pemerintahan.

3. Peranan Pemimpin Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penghubung.

Peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai penghubung untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dikelurahan gunggung berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat telah menjalankan tugas dan fungsinya memimpin organisasi dengan melakukan pembinaan dan hubungan yang harmonis antara seksi bidang kerja secara internal atau kedalam organisasi, agar semua fungsi bidang organisasi dapat dipastikan berjalan dengan baik. Sebelum melakukan hubungan keluar, setelah dipastikan bahwa semua bagian organisasi semua berfungsi dengan baik barulah pimpinan Lembaga pemberdayaan masyarakat melakukan hubungan keluar organisasi secara kolektif atau perseorangan atau personal ketua atau sekretaris melakukan pendekatan untuk menghubungi Lembaga instansi pemerintah kota atau Lembaga-lembaga vertikal yang menyalurkan bantuan-bantuan sosial dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kecil dan lemah yang diakibatkan oleh covid-19. Dari usaha-usaha tersebut diperoleh beberapa bentuk bantuan untuk kegiatan pengembangan pembangunan ekonomi kecil dan atau UMKM yang ada dikelurahan gunggung serta bentuk bentuk bantuan sosial lainnya seperti pembangunan perumahan sederhana dan sanitasi untuk menjamin Kesehatan masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. peranan sebagai pemimpin, menunjukkan bahwa peranan pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar dikelurahan gunggung berjalan secara

normative dibawah kepemimpinan ketua LPM masa bakti 2021 – 2022, pemimpin telah melaksanakan tugas dan fungsi pokok memimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengemudikan LPM didalam melaksanakan tugas dimulai dari penyusunan pelaksanaan kegiatan, monitoring, pelaporan serta evaluasi dibidang, pembuatan peraturan kelurahan (legislasi), penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja kelurahan. 3. Melaksanakan pengawasan kegiatan pemerintah kelurahan didalam pelayanan kepada masyarakat. Dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dialokasikan kekelurahan yang bersumber dari dana APBN dan APBD provinsi serta APBD kota termasuk pembangunan pasar rakyat yang berkedudukan dikelurahan gunggung agar berjalan sebagaimana mestinya serta tidak ada gangguan kekacauan dilingkungan pasar, hal ini dapat dikategorikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik.

2. peranan penghubung atau perantara, pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar di kelurahan gunggung, telah menghasilkan berbagai bantuan dari beberapa lembaga yang berada diluar kelurahan yang memiliki program bantuan-bantuan khusus bagi masyarakat ekonomi mikro kecil dan lemah. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi Sulawesi utara dan daerah kota kotamobagu. Dalam kegiatan ini pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat dipandang telah berhasil

mendapatkan dana bantuan tetapi didalam pelaksanaan distribusi, mendapatkan komplek dari anggota masyarakat ekonomi kecil dan lemah sebagai penerima, karena dipandang belum dilaksanakan dengan baik. Sesuai ketentuan atau kriteria, dimana ada anggota masyarakat yang memiliki kriteria lebih miskin tidak mendapat bantuan dibandingkan dengan orang miskin yang relatif lebih mapan. Dengan demikian pada kategori ketiga ini peranan pemimpin pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pasar dapat dikategorikan cukup dapat dilaksanakan, karena disebabkan oleh hal-hal yang subyektif dalam penyaluran bantuan.

Saran

1. Pada kategori pertama pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan gunggung telah memperoleh kategori sangat baik atau sangat memuaskan maka hal ini perlu terus dipertahankan untuk menjadi contoh bagi pengurus LPM selanjutnya.
2. Pada kategori kedua pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan gunggung telah memperoleh kategori baik atau memuaskan maka dalam hal ini harus dipertahankan atau perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat
3. Pada kategori ketiga pemimpin Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan gunggung telah memperoleh kategori cukup dapat melaksanakan tugas atau cukup memuaskan dalam hal melakukan distribusi, untuk memperoleh penilaian masyarakat yang lebih baik perlu memperbaiki

data dan kriteria penerima bantuan dengan jelas dan dilaksanakan secara transparan.

Daftar Pustaka

- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004; Kemitraan dan model-model pemberdayaan Yogyakarta, Gaya Media.
- Aprillia Theresia, Krisnha S., Prima. G.P dan Totok M. 2014. Pembangunan berbasis masyarakat, Bandung. Alfabeta.
- Djam'an Satari, Aan Komariah. 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta
- Herdiansyah Haris 2015, Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu psikologi. Jakarta, Salemba Humanika
- Iwan Nugroho, dan rokhmin dahuri, 2012, pembangunan wilayah prespektif ekonomi, sosial dan lingkungan Jakarta, LP3ES.
- John Creswell, 2015. Penelitian kualitatif & desain riset, memilih diantara lima pendekatan, Yogyakarta, Pustaka belajar.
- 2016, Reserch design, pendekatan metode penelitian kualitatif. Kuantitatif dan campuran. Yogyakarta, Pustaka belajar
- Koentjaningrat, 2015 pengantar ilmu antropolgi Jakarta, Rinaka Cipta
- Miftah Thoha, 2020 kepemimpinan dalam menajemen, depok, PT Rajagrafindo persada.
- Moleong, Lexy J. 2013, metode penelitian kualitatif. Edisi revisi. Reformasi, perencanaan startegi dan peluang Jakarta: Erlangga.
- Rahyunir dan yusri munaf, 2015. Lembaga kemasyarakatan di Indonesia, pekanbaru. Zenata publishing
- Robinson tarigan M.R.P. 2015, perencanaan pembangunan wilayah. Jakarta P.T. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Totok mardikanto dari poerwoko soebianto, 2012, pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public, Bandung, Alfabeta.
- Uber Silalahi, 2017, Asas asas manajemen, Bandung, Rafika aditama
- Sumber lain:
- Kamus besar Bahasa Indonesia tahun 2008 Jakarta balai Pustaka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka Panjang nasional tahun 2005-2025.
- Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan